

INFRASTRUKTUR

KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KONSTRUKSI JALAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Supply and Demand of Road Construction Experts in The Province of Cetral Sulawesi

Nirmalawati

Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako-Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Palu 94118

Email : nirmalawati_she@yahoo.co.id

Mastura Labombang

Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako-Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Palu 94118

Email : mst_labombang@yahoo.com

Andi Asnudin

Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako-Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Palu 94118

ABSTRACT

Increased construction in Central Sulawesi province, of course, required professional construction workers. But in fact the number of construction workers in particular construction workers certified, approximately 11.75% of the total construction labor, ie 4311 people have the skills and certificates 983 people having a certificate of. The evidence suggests that there are many service providers who do not have a road construction workers certified expertise and skills. The purpose of this study is, (a) to find out and learn how to condition and capacity of the overall construction manpower needs in the province of Central Sulawesi; b) to map the availability and need for construction workers in the province of Central Sulawesi. This study is a descriptive research, survey methods, interviews and questionnaires is also equipped with. The study population was all contractors, consultants, planners and consultants supervisors engaged in road construction work in the province of Central Sulawesi, service users, providers and institutional construction workers while the secondary data obtained from the data of existing road projects in the province of Central Sulawesi. The study states: (1) is not a match between the supply and demand of construction workers who support the organization of construction work in the province of Central Sulawesi and also the majority of experts still way less competence and professional in her work, (2) the availability of road construction experts showed only 24.6% (318 people) compared to the needs (1292 people) in Central Sulawesi province in 2012. While the views of graduation in engineering graduates yearly average might be about 25.3% (246 people) than from necessity (974 persons), assuming all the graduates to work in accordance with their fields.

Keywords: *availability, needs, Expert, road construction*

ABSTRAK

Meningkatnya pembangunan konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah, tentunya diperlukan tenaga konstruksi yang profesional. Tetapi pada kenyataan jumlah tenaga konstruksi khususnya tenaga konstruksi yang bersertifikat, sekitar 11,75% dari jumlah tenaga konstruksi, yaitu 4311 orang memiliki sertifikat keterampilan dan 983 orang memiliki sertifikat keahlian. Fakta menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan penyedia jasa konstruksi jalan yang belum memiliki tenaga kerja bersertifikat keahlian maupun keterampilan. Tujuan penelitian ini adalah, (a) untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana kondisi kapasitas dan kebutuhan tenaga konstruksi secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tengah; (b) untuk melakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga konstruksi di Provinsi Sulawesi tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, metode survey, wawancara dan dilengkapi juga dengan pengisian kuesioner. Populasi penelitian adalah semua perusahaan kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas yang bergerak di bidang pekerjaan konstruksi jalan di Provinsi Sulawesi Tengah, pengguna jasa, serta institusi penyedia tenaga kerja konstruksi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data proyek jalan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menyatakan: (1) masih belum adanya kesesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga konstruksi yang mendukung penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga masih adanya sebagian tenaga ahli jalan yang kurang kompetensi serta profesional dalam pekerjaannya; (2) ketersediaan tenaga ahli konstruksi jalan menunjukkan hanya ada 24,6 % (318 orang) dibandingkan dengan kebutuhan (1292 orang) yang ada di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012. Sedangkan dilihat dari kelulusan di jurusan keteknikan rata-rata pertahun dapat mengeluarkan lulusan sekitar 25,3 % (246 orang) dibandingkan dari kebutuhan (974 orang), dengan asumsi semua lulusan bekerja sesuai bidangnya.

Kata Kunci : ketersediaan, kebutuhan, Tenaga Ahli, konstruksi jalan

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pekerjaan konstruksi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat besar, utamanya adalah pada pekerjaan infrastrukturnya. Berbagai pembangunan meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diuraikan didalam Renstra Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016; yaitu: (a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan; (c) peningkatan pembangunan infrastruktur; (d) reformasi birokrasi dan penegakkan supremasi Hukum dan HAM; dan (e) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Seiring dengan semakin meningkatnya pekerjaan konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah, kebutuhan tenaga kerjapun mengalami peningkatan, utamanya adalah pada tenaga kerja konstruksi yang berkompeten akan banyak dibutuhkan guna kelancaran seluruh pekerjaan konstruksi. Dikarenakan dalam industri konstruksi, tenaga kerja merupakan faktor kunci yang menentukan penyelesaian suatu proyek konstruksi, hal ini berhubungan dengan produktivitas yang bisa mereka hasilkan.

Prioritas Peningkatan pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan baik dan berhasil apabila kualitas sumber daya manusianya tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari data RENSTRAProvinsi Sulawesi Tengah (2011) tentang kondisi infrastruktur, antara lain bahwa yang menyatakan bahwa panjang jalan di Provinsi Sulawesi Tengah, jalan negara 1.806,46 Km: terdiri atas jalan mantap sekitar 1.321,43 Km (73%), dan jalan tidak mantap sekitar 485,03 Km (27%). Sedangkan panjang Jalan Provinsi 2.037,06 Km, terdiri atas jalan mantap sekitar 1.162,63 Km (57%), dan jalan tidak mantap sekitar 874,38 Km (43%). Uraian lain menyebutkan total panjang jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3843,52 km, dengan kondisi jalan baik 1095,96 km. Sisanya 71,5 % mengalami kerusakan ringan, berat dan belum tembus.

Salah satu faktor utama penyebab kerusakan infrastruktur dan tingkat layanan yang rendah dari infrastruktur tersebut akibat berbagai faktor, antara lain yang berkaitan dengan kompetensi tenaga kerja

konstruksi yang bekerja di lapangan. Kompetensini bukan hanya dilihat dari tenaga terampilnya saja tetapi juga dari tenaga ahlinya.

Dari hasil kajian awal, menunjukkan bahwa kondisi tenaga kerja konstruksi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sangatlah minim. Data statistik Provinsi Sulawesi Tengah (2011) menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi adalah 45.054 orang. LPJKD Sulteng (2010) menyatakan bahwa tenaga kerja yang bersertifikat, berkompeten hanyalah sekitar 11,75% dari jumlah tenaga kerja konstruksi, dengan uraian yaitu 4311 tenaga kerja untuk sertifikat keterampilan dan 983 orang untuk keahlian.

Fakta lain yang ditemukan di lapangan masih menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah, masih banyak perusahaan penyedia jasa konstruksi terutama dibidang pekerjaan jalan yaitu perusahaan kontraktor dan konsultan yang belum memiliki sertifikat keahlian (SKA) maupun sertifikat keterampilan bagi tenaga terampilnya. Padahal persyaratan utama untuk mengajukan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan mempelajari secara mendalam bagaimana kondisi kapasitas dan kebutuhan tenaga ahli konstruksi pada pekerjaan infrastruktur secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tengah serta untuk melakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang di Provinsi Sulawesi tengah. Sehingga sehingga nantinya akan dapat digunakan sebagai masukan bagi stakeholders dan pimpinan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang utamanya pada pekerjaan konstruksi jalan.

b. Tinjauan pustaka

1). Gambaran umum Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan Provinsi terbesar di pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 68.033,00 km² yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta kepulauan Togean di Teluk Tomini dan Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dengan luas wilayah adalah 189.480 km².

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah berkembang menjadi 10 wilayah kabupaten dan satu kota administratif, yaitu: Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, Buol, ParigiMoutong, Tojo Una Una, dan Sigidengan setiap luas daratan sekitar

3.214,46 km², 9.672,70 km², 15.490,12 km², 8.712,25 km², 5.275,69 km², 4.079,77 km², 4.043,57 km², 6.231,85 km², 5.721,51 km², dan 5.196,02 km² serta Kota Palu (395,06 km²).

2). Tenaga Kerja Konstruksi

Tenaga kerja konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu proyek yang ditugaskan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam proyek konstruksi. Tomas Aprilian (2010) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Hal yang sama dijelaskan oleh Wulfram (2002) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah salah satu sumberdaya yang tidak mudah dikelola. Upah yang diterima bervariasi sesuai dengan kecakapan masing-masing tenaga kerja.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja konstruksi adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan di dalam lingkungan proyek konstruksi guna menghasilkan bangunan dan memiliki keahlian dan ketrampilan.

3). Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi

Berdasarkan UURI Nomor 13 tahun 2003 menyatakan pengertian dari kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SSKKNI) menjelaskan pengertian kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Mc Clelland (1966) mendefinisikan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang "outstanding performers" lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan penilai kebijakan.

Pendapat yang sama dari Spencer dan Spencer (1983), yang menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik yang mendasar seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya, sehingga kompetensi merupakan kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang

dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Palan (2003) menyimpulkan arti kompetensi dari beberapa pendapat ahli yang didasarkan dari perkembangan awal artikel David McClelland yaitu *Testing for Competence Ratherthan Intelligence*, bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar yang tidak tampak dan yang tampak seperti motivasi, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, dan ketrampilan yang menghasilkan kinerja sesuai standar yang ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa pengertian kompetensi mempunyai kesamaan, yaitu menekankan pada karakteristik dasar seseorang pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Dimana karakteristik dasar ini terdapat dua macam, yaitu: (1) karakteristik dasar yang tidak tampak, terdiri dari motivasi, sifat, konsep diri, dan nilai-nilai; dan (2) karakteristik dasar yang tampak, terdiri dari pengetahuan, dan keterampilan.

4). Tenaga Ahli Bidang Jasa Konstruksi

Tenaga ahli bidang jasa konstruksi perlu meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja konstruksi adalah melalui pemberdayaan yaitu dengan melakukan pembinaan standar kompetensi kerja maupun pelatihan. Seperti diketahui bahwa setiap perusahaan dengan klasifikasi kecil, menengah ataupun besar harus memiliki minimal seorang tenaga ahli perbidang yang sudah diakui oleh salah satu asosiasi keahlian. Sertifikat keahlian bidang konstruksi terbagi atas 3 (tiga) tingkatan yaitu Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) Pasal 1 Ayat 1 dan 2 tentang kompetensi, menyatakan bahwa (a) sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan/atau internasional dan (b) standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi tenaga ahli pada konstruksi di adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk melaksanakan sesuatu yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh para tenaga ahli konstruksi untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial atau

potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi.

5). Proyek Konstruksi

Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu serta dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, dengan ditentukan dengan berbagai persyaratan. Atau dapat disebutkan bahwa proyek adalah sebagai suatu sistem yang dinamis memiliki tahap-tahap perkembangan. Pada masing-masing tahap terdapat kegiatan yang dominan dengan tujuan yang khusus atau yang spesifik.

Sedangkan konstruksi didefinisikan sebagai sebuah proses yang terdiri dari bangunan atau perakitan infrastruktur. Konstruksi juga merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Pekerjaan konstruksi merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan membangun suatu bangunan, dimana bangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis bangunan yaitu: bangunan pergedungan, bangunan sipil (jalan raya, bangunan pengairan, dermagadll) serta bangunan instalasi.

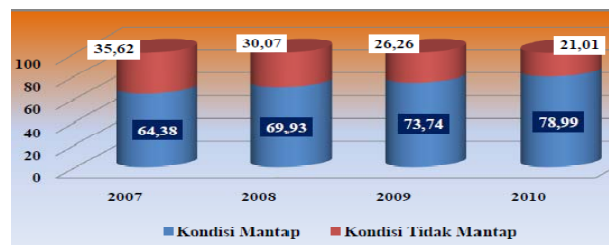
Pembangunan infrastruktur, antara lain bahwa pada konstruksi pekerjaan jalan menurut UU Jalan No 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek konstruksi adalah suatu kegiatan membangun suatu bangunan yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dan tidak rutin. Proyek konstruksi dibatasi oleh waktu, biaya, sumber daya dan spesifikasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

6). Perkembangan Infrastruktur Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah

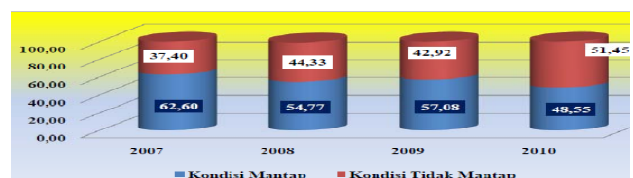
Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2016, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, menjelaskan bahwa pembangunan dibidang infrastruktur jalan selama periode tahun 2006-2010 telah mengalami peningkatan dan rehabilitasi melalui program/ kegiatan APBN dan APBD. Sebagaimana diketahui bahwa hingga tahun 2009

panjang jalan nasional yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sepanjang 1.806,46 km dan pada tahun 2010 panjang jalan nasional tersebut meningkat menjadi 2.181,98 km, sedangkan panjang jalan provinsi hingga tahun 2009 sepanjang 2.037,06 km berkurang menjadi 1.648,75 km pada tahun 2010 sesuai SK Kementerian PU. Terlihat bahwa perkembangan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kondisi jalan mantap nasional, yaitu dari 64,38 persen pada tahun 2007 meningkat menjadi 69,93 persen, tahun 2009 kondisi jalan mantap nasional kembali meningkat hingga menjadi 73,74 persen, serta pada tahun 2010 dapat ditingkatkan lagi menjadi 78,99 persen, dengan perkataan lain selama periode tahun 2007-2010 terjadi peningkatan kondisi jalan mantap nasional sebesar 14,61 persen.



Gambar 1. Persentase perkembangan jalan nasional menurut kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2007-2010 (Sumber: Dinas PU Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2011)

Dilain sisi, kondisi jalan mantap Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2007-2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,05 persen point, yakni pada tahun 2007 kondisi jalan mantap provinsi mencapai 62,60 persen menurun menjadi 54,77 persen, pada tahun 2009 sedikit meningkat menjadi 57,08 persen dan pada tahun 2010 kondisi jalan mantap provinsi turun menjadi 48,55 persen. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya alokasi pembiayaan jalan provinsi yang bersumber dari APBN dan disisi lain alokasi APBD cukup terbatas



Gambar 2. Persentase perkembangan jalan provinsi menurut kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2007-2010 (Sumber: Dinas PU Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2011)

METODE PENELITIAN

Merupakan penelitian deskriptif, metode survey dengan cara survey lapangan dan wawancara secara mendalam yang dilengkapi juga dengan pengisian kuesioner, dengan dipandu pada saat pengisiannya, sehingga diperoleh penilaian responden terhadap pandangan dan pemahamannya. Pengumpulan data primer dilakukan langsung dengan semua perusahaan kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas yang bergerak di bidang pekerjaan konstruksi jalan di Provinsi Sulawesi Tengah, pengguna jasa, serta institusi penyedia tenaga kerja konstruksi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data proyek pekerjaan konstruksi jalan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Data penelitian diambil dari 10 kabupaten serta kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah perusahaan kontraktor yang tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 adalah sebagai berikut: golongan besar 2 perusahaan atau 0,012 persen sedangkan perusahaan golongan menengah 78 perusahaan atau 5,90 persen kemudian untuk golongan kecil berjumlah 1.254 perusahaan atau 94,08 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Evaluasi ketersediaan Tenaga Ahli Konstruksi di Provinsi Sulteng

Evaluasi ketersediaan tenaga ahli konstruksi jalan dapat dilakukan berdasarkan beberapa indikator, antara lain jumlah tenaga ahli yang

bersertifikat/terdaftar pada LPJKD ataupun pada asosiasi tenaga ahli, jumlah lulusan fakultas teknik yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Tengah. Tenaga ahli yang ada pada Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki sertifikat keahlian sekitar 1.347 orang (tabel 1) yang terdiri atas tenaga ahli pemula, ahli muda, dan ahli madya, serta ahli utama. Dimana tenaga ahli muda yang paling dominan 1.044 orang (77,51 persen).

Tabel 1. Jumlah Tenaga Ahli

Uraian	Jumlah (Orang)
Ta. Pemula	42
Ta. Muda	1044
Ta. Madya	245
Ta. Utama	16
Jumlah	1347

Sumber: LPJK, 2011

b. Sebaran Tenaga Ahli di Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah sebaran tenaga ahli (tabel 2) berdasarkan wilayah umumnya berada di Kota Paluyaitu sekitar 967 orang (71,79 persen). Sebaran domisili tenaga ahli dipengaruhi berbagai faktor, antara lain (1) jumlah institusi pendidikan/universitas, (2) jumlah paket pekerjaan di wilayah tersebut, (3) jumlah asosiasi tenaga ahli, (4) wilayah yang dijadikan tempat proses pelelangan dilaksanakan, (5) jumlah penyedia jasa (jasa konsultan dan jasa kontraktor).

Tabel 2. Sebaran Tenaga Ahli di Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Kabupaten	Pemula	Muda	Madya	Utama	Jumlah
Kab. Banggai Kepulauan	1	15	3	1	20
Kab. Luwuk	5	90	12	1	108
Kab. Morowali	2	28	7	0	37
Kab. Poso	3	39	7	1	50
Kab. Donggala	1	44	17	0	62
Kab. ToliToli	4	39	7	0	50
Kab. Buol					
Kab. Parigi	0	7	2	0	9
Kab. TojoUna-Una	0	31	1	0	32
Kab. Sigi	0	10	1	1	12
Kota Palu	26	741	188	12	967
Jumlah	42	1044	245	16	1.347

Sumber: LPJKN, 2011

c. Tenaga Ahli Pada Asosiasi di Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah tenaga ahli yang terdata pada setiap asosiasi (tabel 3) pada Provinsi Sulawesi Tengah

sekitar 1.055 orang dan di antara jumlah tersebut 318 orang (30,14 persen) merupakan tenaga ahli jalan.

Tabel 3. Jumlah Tenaga Ahli Pada Setiap Asosiasi di Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Asosiasi	Jumlah Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Jalan	Keterangan
ATAKI	511	20	Tahun 2009 – 2012
ASTTI	27	11	s/d tahun 2012
ATTTI Astattindo	44	13	s/d 31 Juli 2012
PII	26	10	s/d 5 Agustus 2012
HPJI	535	233	s/d tahun 2012
IAI	87	-	s/d tahun 2012
INKINDO	66	31	s/d tahun 2012
Total	1.055	318	s/d tahun 2012

Sumber: Data Primer, 2012

d. Lulusan Fakultas Teknik di Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah rata-rata lulusan fakultas teknik di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 1.197 orang (tabel 5), dimana jumlah lulusan fakultas teknik dominan merupakan alumni Teknik Sipil pada universitas yang ada diibukotaProvinsi, yaitu dari Universitas Tadulako dan Universitas Muhammadiyah Palu.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah alumni teknik yang dihasilkan universitas yang berada pada wilayah di Sulawesi Tengah masih kurang sehingga peluang kerja bagi tenaga teknik sebagai tenaga ahli cukup banyak dan kekurangan ketersediaan tenaga ahli tentunya dapat dipenuhi dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar wilayah Sulawesi Tengah.

Tabel 4. Rata-Rata Jumlah Lulusan Fakultas Teknik di Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Lulusan (orang)	Keterangan
Universitas Tadulako	4.984	731	Rata-rata pertahun 146 Orang (2007-2012)
Univ. SintuwuMarosoPoso	320	94	Rata-rata pertahun 47 Orang (2010-2012)
UNISMUH PALU		320	Rata-rata pertahun 30 Orang (1983-2012)
UNISMUH LUWUK	203	35	
Univ. TompotikaLuwuk	275	17	Rata-rata pertahun 23 Orang (2000-2012)
Total		1.197	

Sumber Data Primer 2012

e. Evaluasi KebutuhanTenaga Ahli konstruksi di Provinsi Sulteng

Kebutuhan tenaga ahli konstruksi jalan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan tingkat kebutuhan tersebut berdasarkan beberapa indikator, yaitu: (1) panjang ruas jalan dan kondisi, (2) jumlah anggaran proyek yang dialokasikan pada infrastruktur jalan, (3) jumlah paket pekerjaan, (4) jumlah tenaga ahli yang dilibatkan.

f. Kondisi dan Panjang Jalan di Propinsi Sulawesi Tengah

Panjang jalan sekitar 16.079,09 Km (tabel 5) yang ada diProvinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas jalan nasional, Provinsi, dan jalan kabupaten. Kondisi jalan tersebut untuk jalan nasional sekitar 366,47 Km (17,66 persen) dalam kondisi rusak dan untuk jalan Provinsi sekitar 818,81 Km (50,57 persen).Kondisi tersebut tentunya membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, berupa peningkatan kondisi dan perbaikan.

Tabel 5. Panjang Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah

Jenis Jalan	Panjang Jalan (KM)	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat / Belum Tembus
Jalan Nasional	2.074,74	1.091,37	616,90	247,88	118,59
Jalan Provinsi	1.619,26	244,48	555,97	363,07	455,74
Jalan Kabupaten	12.385,09				
Total	16.079,09				

Sumber Data Primer 2012

g. Anggaran Proyek Jalan di Propinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan jumlah anggaran sekitar Rp.911.435.239.764,00 proyek bidang Bina Marga (tabel 6) di Provinsi Sulawesi Tengah. Kebutuhan tenaga ahli cenderung mengalami kenaikan yang cukup besar, sekitar 872 orang untuk penyedia jasa konstruksi dan kebutuhan tenaga ahli untuk jasa konsultan sekitar 420 orang. Dengan melihat tingkat kebutuhan tenaga ahli jalan sangat dibutuhkan tenaga ahli dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 6. Jumlah Anggaran Proyek di Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Total Anggaran Biaya
Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga 2012	716.424.112.000
Pelaksanaan Jalan Provinsi Dinas PU Bina Marga 2012	195.011.127.764

Sumber: Data Primer 2012

Dari hasil survey wawancara didapatkan hasil bahwa jumlah paket pengawasan konstruksi setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012, dimana peningkatan paket pengawasan sekitar 100 persen yang tentunya berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan tenaga ahli

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan dan kebutuhan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih belum mencukupi seluruh kebutuhan pada pekerjaan konstruksi jalan. Adapun gambarannya disajikan pada uraian berikut:

1). Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesediaan tenaga ahli sering kali menjadi permasalahan bagi penyedia jasa (kontraktor dan konsultan) terkait dengan persyaratan pada lembar dokumen pengadaan (LDK) yang dipersyaratkan, yaitu: (a) klasifikasi tenaga ahli ditinjau dari tingkat keahlian dan pengalaman kerja, dan (b) jumlah tenaga ahli konstruksi yang dipersyaratkan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengumpulan data, yaitu total kesediaan tenaga ahli jalan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah adalah 318 orang. Sedangkan kebutuhan dalam satu tahun anggaran yaitu sekitar 872 orang untuk penyedia jasa konstruksi dan kebutuhan tenaga ahli untuk jasa konsultan sekitar 420 orang. Jumlah kesediaan tenaga ahli jalan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan dibandingkan dengan kebutuhan hanya sekitar 24,6 persen dapat terpenuhi. Dengan melihat tingkat kebutuhan tenaga ahli jalan tentunya sangat dibutuhkan ketersediaan tenaga ahli dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan jumlah anggaran sekitar Rp.911.435.239.764,00 pada proyek bidang Bina Marga yang ada pada Provinsi Sulawesi Tengah kebutuhan tenaga cenderung mengalami kenaikan yang cukup besar, tentunya kebutuhan akan tenaga ahli akan semakin meningkat. Seperti juga dari hasil survey di perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Fakultas Teknik didapatkan data jumlah lulusan pertahun rata-rata sebanyak 246 orang. Dari data dapat dilihat bawa total kekurangan tenaga ahli adalah sekitar 974 orang atau 75,4 persen dari kebutuhan. Sehingga kebutuhan tenaga ahli akan terpenuhi membutuhkan waktu ke depan selama 4 (empat) tahun

Tabel 7. Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Sulteng

Instansi	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)	Jumlah Tenaga Ahli	Ket.
PU Kota	Pekerjaan Peningkatan jalan 17 lokasi (17 paket)	82.227.051.650	64	APBD
Satker Pelaksana Jalan Nasional Wil. I Sulteng	Pekerjaan pelebaran jalan 5 paket	80.120.722.000	10	APBN
	Pekerjaan jembatan 14 paket		18	
Satker Pelaksana Jalan Nasional Wil. III Sulteng	Anggaran Biaya Tahun anggaran 2012 (23 paket pekerjaan)	201.232.087.823	76	APBN
	Anggaran Biaya Tahun anggaran 2011(10 paket pekerjaan)	85.253.176.000	40	APBN
Satker Pelaksana Jalan Nasional Wil. II Sulteng	Anggaran Biaya Tahun anggaran 2012 (12 paket pekerjaan)	91.544.594.000	59	APBN
PU Binamarga Pengawasan	Tahun Anggaran 2012 (31 paket)	29.336.043.000	420	APBN
	Tahun Anggaran 2011 (21 paket)	24.749.548.890	268	APBN
	Tahun Anggaran 2010 (11 paket)	9.535.334.000	176	APBN
Kabupaten Donggala	Rehabilitasi jalan (10 paket)	3.748.974.000	30	APBD
	Pemeliharaan Rutin Jalan (17 paket)	1.180.000.000	54	
	Pemeliharaan rutin Jalan (8 paket)	4.334.907.080	26	
	Peningkatan jalan pedesaan (29 paket)	4.998.000.000	58	
	Pembangunan jalan (10 paket)	1.190.000.000	30	
Kabupaten Sigi	Jumlah paket 28	11.156.046.000	72	APBD
Kabupaten Parigi	Jumlah paket 10	11.620.269.000	30	APBD
Kabupaten Boul	Jumlah paket 8	10.976.387.000	26	APBD
KabupatenPoso	Jumlah paket 15	9.765.891.000	38	APBD
Kab.Toli-Toli	Jumlah paket 11	7.835.364.000	30	APBD
KabupatenLuwuk	Jumlah paket 62	28.264.384.000	166	APBD
Kab. Morowali	Jumlah paket 19	12.358.849.000	64	APBD
KabupatenBanggai Kepulauan	Jumlah paket 7	11.643.289.000	21	APBD

Hasil wawancara didapatkan bahwa kenaikan anggaran di wilayah provinsi Sulawesi tengah rata-rata sekitar 10-20 persen, tentunya hal ini akan sulit dapat terpenuhi. Sedangkan perhitungan ini tidak

melihat lulusan keteknikan yang tidak bekerja dibidangnya, yaitu sekitar 15 persen dari lulusan.

Hal ini tentunya tidak sejalan dengan isi Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan; yaitu pada pasal empat dan lima

yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga.

2). Klasifikasi Tenaga Ahli

Berdasarkan hasil temuan penelitian menyimpulkan bahwa klasifikasi tenaga ahli sulit untuk dipenuhi, karena dibutuhkan tenaga ahli yang profesional, yaitu dengan memiliki kemampuan kapasitas sebagai tenaga ahli, berpengalaman, integritas yang tinggi, kemampuan rekayasa teknologi material, metode kerja, dan pemanfaatan peralatan. Karena tenaga ahli tersebut tidak ada di provinsi Sulawesi Tengah, maka dilakukan mobilisasi tenaga ahli dari luar. Tentunya hal ini akan memberikan konsekuensi pada pembiayaan, dan dianggap membebani penyedia jasa.

Kondisi demikian tidak sejalan dengan uraian dalam pasal delapan, dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: (1) perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi: penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan jaminan sosial tenaga kerja; (2) informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta; (3) ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam pasal sembilan (9) menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Juga seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No 18 Tentang Jasa Konstruksi mengenai persyaratan keahlian dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh penyedia jasa, yaitu pada pasal sembilan menyatakan bahwa (1) perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian; (2) pelaksana konstruksi orang perseorangan harus

memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja; (3) orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian; (4) tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Untuk itu diharapkan pengguna jasa atau pemilik proyek dapat mengimplementasi undang-undang tersebut di atas dengan menggunakan atau menambahkan persyaratan tenaga ahli yang dianggap menyulitkan penyedia jasa atau hanya menguntungkan sekelompok penyedia jasa. Juga memperhitungkan anggaran sesuai dengan kebutuhan SDM yang ada di provinsi Sulawesi Tengah, sehingga tidak membebani para penyedia jasa.

3). Kontrak Kerja Tenaga Ahli

Hasil temuan penelitian juga mendapatkan bahwa periode kontrak konstruksi memiliki waktu yang singkat, yaitu antara 3 bulan sampai dengan 8 bulanan juga sering kali reward yang didapatkan dari penyedia jasa dianggap tidak sesuai sehingga faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi tenaga teknik/alumni teknik dalam menetapkan/menentukan pilihan untuk bekerja. Hal inilah yang menyebabkan banyak ditemukan alumni teknik dalam memilih jenis pekerjaan tidak sesuai dengan disiplin ilmu mereka

4). Pemberdayaan Tenaga Ahli

Hasil wawancara dalam penelitian juga menemukan bahwa tenaga ahli yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah umumnya membutuhkan peningkatan kapasitas (capacity building) terkait dengan (a) perkembangan teknologi dan informasi, (b) penggunaan material baru dan kemajuan teknologi peralatan. Karena kemampuan tenaga ahli dibutuhkan pelibatan dalam tahap desain dan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan pelaksanaan dengan penguatan perilaku profesional yang memiliki integritas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para penyedia konstruksi (kontraktor) yang mengeluhkan bahwa tenaga ahli yang bersertifikat masih banyak yang belum menguasai ketrampilan ilmunya dilapangan, sehingga masih diperlukan pelatihan. Tentunya hal ini dapat menjadi perhatian bagi para asosiasi untuk dapat lebih selektif dalam mengeluarkan sertifikat.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan pada pasal

satu, yaitu mengenai pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi LPJKD di Provinsi Sulawesi untuk dapatnya melakukan pelatihan atau training, workshop dll, yang bertujuan untuk memberikan peningkatan ketrampilan atau pengetahuan bagi para tenaga ahli yang ada di wilayahnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

- a. Masih belum adanya kesesuaian antara ketersediaan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang mendukung penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga masih adanya sebagian tenaga ahli jalan yang kurang kompetensi serta profesional dalam pekerjaannya.
- b. Tenaga kerja konstruksi jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan hanya ada 24,6 persen (318 orang) tersedianya tenaga ahli jalan dibandingkan dengan kebutuhan (1292 orang) yang ada di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012. Sedangkan dilihat dari kelulusan di Fakultas Keteknikan rata-rata pertahun dapat mengeluarkan lulusan sekitar 25,3 persen (246 orang) dibandingkan dari kebutuhan (974 orang), dengan asumsi semua lulusan bekerja sesuai bidangnya

DAFTAR PUSTAKA

- Bilal, Ahmad. 2004. Analisis Perencanaan Sumber daya Tenaga pada Proyek Konstruksi. Yogyakarta: UII.
- Dessler, Gary. 2003. Human Resource Management, 9th edition. Prentice Hall
- Djarmika, S.S., dkk. 2005. Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja konstruksi dengan Melakukan Restrukturisasi Kerangka Klasifikasi, kualifikasi dan Bakuan, Kompetensi Kerja, Proceeding Seminar Nasional Peringatan 25 tahun Pendidikan MRK di Indonesi. Bandung: Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung.
- Martoyo, Susilo, SE. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE

- Mitrani. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi. Penerjemah Dadi Pakar. Jakarta: Putaka Utama Grafiti.
- Nawawi, H. & Nawawi, M. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Notoatmojo, S. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Singgih. 2002. Statistik dengan SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Penerbit Bandung: Alfabeta
- Schuler, R., & Susan E. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad Ke-21. Jakarta: Erlangga.
- Syafaruddin, Alwi, MS, Drs. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan